

Book Chapter



PROBLEM Sosial Budaya

Harifudin Halim, Ontran Sumantri Riyanto, Abdullah Akhyar Nasution
Meilani Dhamayanti, Sri Ningsih, Faidah Azuz, Sa'diyah El Adawiyah,
Santi Susanti, Muhammad Hasan, Andi Hartati, Nurliah, M. Syaiful
Abdul Nadjib, Mustiqowati Ummul Fithriyyah, Awaluddin Hasrin, Heriani

Editor : Sulfitri Husain



PROBLEM
SOSIAL BUDAYA

Harifudin Halim, Ontran Sumantri Riyanto, Abdullah Akhyar Nasution
Meilani Dhamayanti, Sri Ningsih, Faidah Azuz, Sa'diyah El Adawiyah,
Santi Susanti, Muhammad Hasan, Andi Hartati, Nurliah, M. Syaiful
Abdul Nadjib, Mustiqowati Ummul Fithriyyah, Awaluddin Hasrin, Heriani



PROBLEM SOSIAL BUDAYA

Nuta Media, Yogyakarta

Ukuran. 15 x 23

Halaman 152 + iv

Cetakan : I, Nopember 2021

ISBN : 978-623-5967-02-8

Penulis : Harifudin Halim, Ontran Sumantri Riyanto,
Abdullah Akhyar Nasution, Meilani Dhamayanti, Sri Ningsih, Faidah Azuz,
Sa'diyah El Adawiyah, Santi Susanti, Muhammad Hasan, Andi Hartati, Nurliah
, M. Syaiful Abdul Nadjib, Mustiqowati Ummul Fithriyyah, Awaluddin
Hasrin, Heriani

Editor : sulfitri Husain

Sampul : latif azhad mustofa

Layout : ari setiawan

Diterbitkan oleh :

Nuta Media Jogja

Anggota IKAPI: No. 135/DIY/2021

Jl. P. Romo, No. 19 Kotagede Jogjakarta/

Jl. Nyi Wiji Adhisoro, Prenggan Kotagede Yogyakarta

nutamediajogja@gmail.com; 081228153789

@2021, Hak Cipta dilindungi undang-undang, dilarang keras menterjemahkan,
memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit

ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PENERBIT DAN PERCETRAKAN
dicetak olah : Nuta Media

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang pantas Tim Penulis haturkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa atas rasa bahagia yang dianugerahkan kepada kami sehingga penulisan *Book Chapter* ini dapat selesai. Dalam proses pengumpulannya, dilakukan dengan penuh perjuangan, berkoordinasi dengan tim penulis, saling memotivasi dan mengingatkan tanggungjawab masing-masing demi kepentingan bersama yang telah disepakati.

Penulisan *Book Chapter* ini merupakan curahan gagasan brilian dari akademisi, pemerhati dan praktisi sosial, ekonomi, dan hukum. Juga sebagai bentuk kolaborasi ilmiah dalam memasyarakatkan gagasan cemerlang tersebut. Buah pikiran yang ada ini pun merupakan bentuk keprihatinan Tim Penulis atas realitas sosial sehari-hari yang masih jauh dari harapan ideal, sehingga diperlukan sebuah upaya akademik dalam mencari solusi dengan menarasikan problematika sosial-budaya-ekonomi-hukum tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, *Book Chapter* ini pun mengeksplorasi berbagai sudut pandang (perspektif) atas problematika yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Diantaranya persoalan sosial budaya dalam pemberdayaan masyarakat, penanganan lingkungan, penyelesaian konflik agama, pendampingan masyarakat urban dan pesisir, masalah pendidikan, pengentasan kemiskinan, relasi negara dan masyarakat, media digital, masyarakat konsumen, penanganan bencana, perbaikan kesehatan masyarakat, pertanian, penanganan narkoba, dan kepariwisataan merupakan tema utama yang dikaji secara mendalam. Hasil kajian tersebut memberikan perspektif baru bagi pembaca sekaligus menjadi informasi dan rujukan bagi penentu kebijakan dalam merumuskan penanganan atas berbagai kasus yang ditemukan.

Dengan penuh rasa bangga dan bahagia kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi atas penyelesaian dan penerbitan karya akademik ini, terutama kepada Organisasi CEL-KODELN, Penerbit Nuta Media, serta Tim Penulis (Harifuddin Halim, Andi Hartati, Awaluddin Hasrin, Sa'diyah El-Adawiyah, Nurliah, Santi Susanti, Abdul Nadjib, Mustiqowati Ummul Fithriyyah, Meilani Dhamayanti, Muhammad Hasan, Abdullah Akhyar Nasution, Sri Ningsih, Faidah Azuz, Ontran Sumantri Riyanto, dan Heriani) atas komitmen dan kerjasamanya.

Terakhir, semoga persembahan *Book Chapter* ini memberi manfaat yang besar baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga karya ini menjadi amal baik yang berkepanjangan. Aamiin....

TIM PENULIS

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

Bab 1.	Problem sosial budaya pemberdayaan masyarakat	1
Bab 2.	Problem sosial budaya dalam penanganan lingkungan.	9
Bab 3.	Problem sosial budaya dalam penanganan konflik agama di Indonesia	22
Bab 4.	Problem sosial budaya masyarakat pesisir	29
Bab 5.	Problem sosial budaya masyarakat urban	41
Bab 6.	Problem sosial budaya pendidikan	49
Bab 7.	Problem sosial budaya pengentasan kemiskinan	59
Bab 8.	Problem sosial budaya dalam relasi negara dan masyarakat	76
Bab 9.	Problem sosial budaya media digital	85
Bab 10.	Problem sosial budaya dalam masyarakat konsumen	92
Bab 11.	Problem sosial budaya dalam penanganan bencana	103
Bab 12.	Problem sosial budaya dalam penanganan kesehatan masyarakat	118
Bab 13.	Problem sosial budaya dalam masyarakat pertanian	125
Bab 14.	Problem sosial budaya dalam penanganan narkoba	134
Bab 15.	Problem sosial budaya dalam kepariwisataan	141

BAB 1

PROBLEM SOSIAL BUDAYA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Harifuddin Halim & Faidah Azuz

A. Pendahuluan

Sejak era reformasi menggema pada tahun 1998 sekaligus tonggak berakhirnya rezim Orde Baru, istilah 'pemberdayaan' mulai populer di kalangan akademisi dan praktisi. Hingga saat ini, 'pemberdayaan' masih terus digemakan dan menjadi bagian dari misi lembaga-lembaga pemerintah maupun non-pemerintah.

Pada lembaga pendidikan khususnya di perguruan tinggi, pemberdayaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari misi lembaga yang bersangkutan. Begitu pentingnya 'pemberdayaan' sebagai bagian dari rencana sebuah lembaga pendidikan, maka pemerintah menetapkan indikator 'pemberdayaan' sebagai standar kualitas tinggi atau kualitas rendah. Penilaian kualitas ini berpengaruh besar terhadap keterpilihan perguruan tinggi oleh masyarakat yang hendak mempergunakan jasa lembaga tersebut.

Rezim Orde Baru dikenal sebagai rezim yang otoriter dengan kekuasaan penuh di tangan presiden. Oleh karena itulah, rezim ini dikenal menggunakan sistem terpusat atau pemerintahan sentralistik. Ini berarti semua sistem penyelenggaraan kehidupan bernegara diputuskan oleh presiden sehingga dapat dikatakan bahwa presiden Orde Baru mirip dengan Tuhan, hanya keputusan presiden yang benar selain itu tidak benar (Alam 2008).

Sistem sentralistik di masa Orde Baru sangat ketat pelaksanaannya. Intervensi presiden sangat dominan sehingga masyarakat tidak memiliki suara atau gagasan. Bahkan, ada indikasi masyarakat mengalami keterbungkaman untuk menyuara aspirasi sesuai kebutuhan dan kepentingan mereka.

Dalam pelaksanaan pembangunan, masyarakat hanya menunggu apa yang akan dilakukan oleh negara. Negara punya pertimbangan tersendiri yang tak boleh ditentang oleh masyarakat dalam pembangunan. Akibatnya, banyak pembangunan sia-sia karena tidak dibutuhkan oleh masyarakat.

Rezim otoriter Orde Baru berkuasa cukup lama sekitar 30 tahun. Ini berarti masyarakat juga mengalami 'kebisuan' selama itu. Bahkan ketika rezim otoriter tersebut tumbang, masyarakat belum mampu 'bersuara'. Mereka baru sampai pada tahap gagap. Kenapa mereka gagap? karena masyarakat tidak tahu apa yang harus disuarakan dan siapa yang mendengarkan mereka. Meskipun masyarakat memahami bahwa selama ini bukan hanya mereka yang diam, tetapi struktur sosial seperti lembaga negara, dan lembaga masyarakat juga menjadi bagian dari kegagapan tersebut. Masyarakat juga paham bahwa struktur negara harus menjadi pengayom mereka dalam bernegara, tetapi lembaga negara itulah yang justru melanggengkan kegagapan sebagai otoritas negara.

Di era modern ini, konsep pemberdayaan makin laris dan menjadi jualan politik. Para politisi ramai-ramai menjadikan pemberdayaan sebagai bargaining politik untuk menaikkan popularitas keterpilihan (elektabilitas) mereka kelak. Hal ini kemudian diperkuat oleh adanya dana atau anggaran di legislatif terkait pemberdayaan di daerah pemilihan masing-masing.

Sementara itu, pemerintah pun menggandeng para akademisi, dan kalangan industri untuk terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat sesuai bidang masing-masing. Ini sebagai bentuk antisipasi atas pengalaman sebelumnya dimana pelaksana pemberdayaan terfokus pada pemerintah sebagai inisiator tunggal. Pemerintah telah melibatkan banyak kelompok masyarakat untuk mensukseskan kegiatan tersebut (Mulyani 2020). Ada banyak program pemberdayaan dilakukan pemerintah tetapi belum memberi dampak signifikan kepada masyarakat yang diberdayakan, bahkan cenderung mubazir. Meskipun demikian, hari ini konsep 'pemberdayaan' masih mencari bentuk dan terus mengalami proses perbaikan dan adaptasi atas kondisi sosial masyarakat. Tumbangnya Orde Baru menyisakan masalah besar terhadap aspek sosial-budaya masyarakat yang mulai terbuka dan sadar akan kondisinya. Masyarakat mulai menyadari bila mereka seakan-akan baru terbangun dari tidur panjang yang mematikan nalar mereka. Mereka seakan-akan baru melihat dunia luar yang penuh dengan kebebasan untuk hidup sebagai ekspresi kemanusiaan yang sebenarnya. Oleh karena itulah, tulisan ini mengungkapkan persoalan-persoalan sosial budaya yang tersisa dari perlakuan rezim otoriter Orde Baru.

B. Problem Sosial-Budaya dalam Pemberdayaan

Banyak data dan hasil penelitian menegaskan bahwa penjajahan yang pernah dialami bangsa Indonesia menimbulkan dampak yang dahsyat terhadap kehidupan masyarakat. Penjajahan bukan hanya terkait perampasan terhadap sumberdaya alam (imperialisme) negara Indonesia, tetapi juga merusak tatanan budaya Indonesia dengan memasukkan budaya Eropa secara paksa ke dalam masyarakat.

Dampak sosial budaya tersebut kemudian berlanjut di zaman orde baru yang otoriter. Keotoriteran pemerintah Orde Baru menyebabkan masyarakat Indonesia 'mati nalar'. Kekangan nalar ini berakibat pada munculnya berbagai masalah dalam kehidupan masyarakat meliputi aspek budaya, sosial, ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya.

Disadari bahwa untuk membangun masyarakat yang maju dan mandiri, masyarakat harus mampu menyuarakan gagasannya. Namun, untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan waktu yang lama dengan melakukan intervensi sosial-budaya oleh pemerintah sekarang.

Sebelum melakukan upaya-upaya pemberdayaan tersebut, perlu ada identifikasi terhadap ragam problem sosial-budaya yang masih eksis di tengah masyarakat, sebagai berikut:

1. Kuatnya budaya feodal

Feodalistik merupakan istilah politik khususnya kekuasaan yang terjadi di masa dulu saat masih kuatnya dominasi raja dan kaum bangsawan. Dalam melanggengkan kekuasaannya, raja bekerjasama dengan para bangsawan di sebuah wilayah sebagai kaki tangannya (Anonim 2021; Kurniawan 2021).

Di zaman modern sekarang, karakteristik budaya feodal masih banyak terjadi di wilayah perdesaan meski tidak sekuat dulu lagi. Feodalitas yang dilanggengkan oleh anak keturunan bangsawan dan keturunan raja dulu pun ikut mengalami rasionalitas. Rasionalitas yang dimaksud terbungkus dalam wujud kapitalisme modern persis sama dengan kapitalisme feodal zaman dulu (Sonbait and Wambrauw 2011).

Di zaman dulu, roh feodalisme adalah kapitalisme dalam bentuk material yang berlaku di zamannya seperti tanah dan hewan ternak ditambah kekuasaan. Sementara itu, di era modern ini kapitalisme menjadi roh modernitas yang dibonceng oleh feodalisme berbaju kolaborasi.

Disebabkan oleh konsep pemberdayaan sebagai jargon 'demokrasi' yang substansinya menyediakan ruang sosial-politik yang sama bagi individu, tentu ini sangat bertolak belakang dengan semua jargon yang dibangun oleh feodalisme yang substansinya adalah 'raja' dan 'hamba' atau 'patron-klien'.

Secara psikologis, jargon 'raja' dan 'hamba' atau 'patron-klien' berdampak pada masyarakat. Mereka yang bertahun-tahun mempertuankan kaum raja dan bangsawan cenderung memiliki jiwa yang introvert, tidak mau menonjolkan dirinya dengan berbagai kelebihannya. Masyarakat terbiasa menonjolkan kaum bangsawan atau kaum raja meski tak memiliki kapabilitas apapun. Situasi inilah kemudian yang mengkonstruksi sosial-budaya masyarakat menjadi sebuah karakter terbelakang.

Ketika jargon 'pemberdayaan' mengarus-utama dalam pembangunan, masyarakat sebagai subyek pemberdayaan memerlukan waktu yang cukup lama untuk keluar dari sosial-psikologi mereka yang terbelakang, kurang percaya diri menuju individu yang merdeka dan berdaya dalam menjalani kehidupan masing-masing.

2. Rendahnya motif berprestasi

Konsekuensi lain dari budaya feodal adalah rendahnya motivasi untuk mencapai hal-hal terbaik dalam kehidupan mereka. Mereka tidak perlu mencapai hal-hal luar biasa dibandingkan orang lain yang dapat membuat mereka menonjol, sombong dan lebih baik dari orang lain. Bagi masyarakat desa, kehidupan itu harus disyukuri apabila dalam keschariannya sudah mendapatkan makanan dan minuman. Hal itu tak perlu dilebih-lebihkan.

Pemikiran seperti ini tentu merupakan tantangan besar bagi pelaku pemberdayaan masyarakat yang justru mendorong individu untuk keluar dari masalah hidupnya dengan mengandalkan kesadaran diri atas kapasitas dan kapabilitas mereka untuk bergerak mencapai hal-hal terbaik dalam hidup mereka.

3. Kuatnya budaya determinisme

Budaya deterministik berdekatan dengan 'kepasrahan' yang dalam agama Islam dikenal dengan istilah 'jabariyyah' (Halim 2018). Perspektif ini menganggap bahwa semua keadaan di dunia ini merupakan kehendak Sang Pencipta, dan bukan kehendak manusia sebagai makhluk. Manusia tidak memiliki kehendak dan semua tindakan manusia merupakan kreasi dari Tuhan. Substansi budaya ini menganggap bahwa nasib manusia itu sudah ditentukan oleh Tuhan dan manusia tinggal menjalaninya. Selain itu, pemikiran ini juga menganggap bahwa rejeki manusia sudah ditakar dan bila manusia melewati takaran itu akan menjadi musibah bagi manusia.

Budaya ini juga hidup subur di kalangan masyarakat perdesaan. Salah satu penyebab suburnya pemikiran ini di perdesaan adalah besarnya ketergantungan manusia pada lingkungan alam yang mengakibatkan mereka tidak terlatih mendayagunakan pikiran kreatif mereka. Misalnya, petani yang menggantungkan nasibnya pada lahan pertanian atau nelayan yang tergantung pada hasil laut semata. Mereka cenderung tidak memiliki alternatif kegiatan saat mereka tidak bertani atau melaut. Mereka menerima kejadian itu sebagai ketentuan Tuhan yang harus dipatuhi.

Dalam menjalani nasib tersebut, mereka pun selalu merasa 'cukup' saat memperoleh penghasilan dari pekerjaannya dan berhenti bekerja. Saat penghasilannya habis, mereka mulai bekerja kembali.

Budaya deterministik menjadi tantangan bagi pelaku pemberdayaan yang mengandalkan *'freewill'* manusia. Program pemberdayaan membutuhkan aktualisasi potensi tak terhingga manusia untuk maju bersama, tidak gampang menyerah pada kondisi.

4. Rendahnya budaya kompetisi

Di masyarakat perdesaan tidak mengenal istilah 'persaingan' atau 'kompetisi' sebagai karakteristik asli mereka. Ini menjadi wajar karena mereka terbangun secara sosial atas dasar solidaritas sosial yang tinggi di kalangan mereka. Solidaritas yang isinya harmonisasi dan integrasi, bukan dengan pertentangan dan kompetisi yang dapat merusak ikatan sosial mereka.

Masyarakat desa umumnya masih mengandalkan kekuatan solidaritas sosial dengan berbagai variannya. Masyarakat desa memiliki prinsip pantang bersaing dengan sesama kampung meski dalam hal kecil sekalipun. Mereka cenderung 'mengalah' demi mengutamakan orang lain. Hal yang menarik dari aspek ini adalah mereka mengaitkannya dengan keyakinan khususnya agama untuk mengalah demi kebaikan bersama (Hakim 2015).

Masyarakat desa percaya bahwa persaingan cenderung berdampak tidak baik terhadap hubungan sosial, muncul perasaan cemburu, iri, tidak ingin disaingi, dianggap *over* atau berlebihan, dan menjatuhkan orang lain. Kondisi inilah yang ingin dihindari oleh mereka yang ada di desa.

Sikap-sikap kompetitif sangat diperlukan dalam mensukseskan program pemberdayaan masyarakat. Sikap kompetitif dimaksudkan sebagai pengkondisian sosial agar masyarakat 'tertantang' untuk menemukan solusi atas masalah. Melalui sikap ini masyarakat belajar untuk mengeluarkan gagasan mereka secara maksimal dalam bentuk kolaboratif.

5. Kuatnya pola pikir 'instan'

Masyarakat desa mengenal pola pikir 'instan' dan bukan pola pikir proses. Pola pikir 'instan' mengindikasikan ingin cepat menghasilkan atau cepat sukses (pragmatis). Meskipun demikian, realitas sosial masyarakat pedesaan memiliki pekerjaan yang dilakukan melalui proses, diantaranya: dalam bidang pertanian dan perkebunan. Masyarakat desa sangat telaten menjalani seluruh proses bertani dan kebun yang dilakukan mulai dari persemaian, menanam, memupuk, hingga masa panen sebagai rangkaian dalam mengerjakannya.

Pola pikir 'instan' ini bertolak belakang dengan pola pikir 'proses' yang diusung oleh jargon pemberdayaan. Proses yang dimaksud adalah adanya durasi waktu yang berlangsung dan di dalamnya ada keterlibatan mental atau kesadaran oleh masyarakat yang luarannya adalah kesadaran baru terhadap realitas dan berdampak pada pengambilan keputusan untuk melakukan sesuatu sebagai bentuk langkah solusi terhadap persoalan yang akan dipecahkan. Hal ini persis sebagaimana hasil penelitian tentang mekanisme pemberdayaan gelandangan di Kota Makassar (Iskandar and Halim 2019; Sukhemi and Maisaroh 2019).

6. Rendahnya Budaya Literasi

Budaya literasi dikenal sebagai budaya membaca seperti mengenal jenis bacaan, teknik membaca cepat, teknik membaca substansi buku, dan sebagainya. Pada awalnya, kegiatan ini lebih banyak mengarah pada belajar membaca dan teknik variasinya.

Dalam perkembangannya, pengertian ini mengalami perluasan makna. Literasi atau membaca bukan hanya membaca tulisan, tetapi juga membaca persoalan sosial, persoalan politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya (Abdillah 2021). Pengertian ini seperti memahami istilah 'wacana' yang juga memiliki makna yang luas.

Bagi masyarakat desa, literasi juga menjadi tantangan budaya mereka. Masyarakat desa yang jauh dari hiruk-pikuk politik kenegaraan cenderung menjadi 'mangsa' politik kaum politisi yang sering bertengkar dan mempermainkan mereka yang tidak memiliki pemahaman tentang politik. Dalam konteks inilah kemudian diperlukan Literasi politik bagi mereka untuk meningkatkan kesadaran mereka yang rendah (Reskiaddin et al. 2020).

Dalam kenyataannya, tidak semua masyarakat desa tertarik pada perpolitikan. Mereka lebih senang berbicara tentang kehidupan mereka sehari-hari. Hal-hal seperti inilah yang menjadi sasaran para politisi yang hendak berkuasa. Para politisi membangun sarana di desa sebagai upaya pencitraan, tetapi

pada saat yang sama berkonsekuensi atas imbalan suara kelak. Situasi inilah yang sebenarnya perlu menjadi bahan literasi bagi orang di desa (Apandi 2021).

Bahkan, ketika ada program yang hendak dilaksanakan di desa warga cenderung menunggu hasil dan mengira mereka akan mendapatkan dana bantuan yang akan mereka habiskan tanpa pengembalian. Padahal yang sebenarnya adalah tenaga mereka dibutuhkan dengan gagasannya untuk memperlancar kegiatan tersebut demi kepentingan mereka sendiri.

C. Kesimpulan

Pemberdayaan merupakan bagian dari upaya demokrasi untuk memanusiakan manusia, mengembalikan manusia pada potensi terpendam mereka yang harus diaktualkan. Pemberdayaan meliputi 3 aspek manusia yang paling penting yaitu: pemberdayaan kognitif, pemberdayaan afektif, dan pemberdayaan motorik.

Dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, latar belakang penjajahan tidak bisa dinafikan begitu saja karena akan berdampak besar terhadap psikologi masyarakat Indonesia. Adapun tantangan sosial budaya yang dialami oleh bangsa ini akibat penjajahan antara lain: kuatnya budaya feodalistik, kurangnya kemauan berprestasi, rendahnya budaya kompetitif, kuatnya budaya deterministik, dan pola pikir 'instan'.

Upaya mengatasi hal tersebut, diperlukan pengkondisian melalui penguatan aturan birokrasi di berbagai bidang yang berlangsung dalam waktu yang terukur. Melalui cara ini, dengan sendirinya kesadaran sebagai tujuan pemberdayaan akan muncul termasuk melalui pembiasaan.[]

Daftar Pustaka

- Abdillah, Fahri. 2021. "Memahami Pengertian Literasi, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya." Ruangguru.Com. 2021.
<https://www.ruangguru.com/blog/pengertian-literasi>.
- Alam, Andi Syamsu. 2008. "Andi Syamsu Alam." *Ilmu Pemerintaban 1*.
- Anonim, Anonim. 2021. "Feodalisme." Feodalisme Ensiklopedia Dunia. 2021.
http://p2k.unimus.ac.id/id1/3040-2937/Feodalisme_41114_p2k-unimus.html.
- Apandi, Idris. 2021. "Pentingnya Literasi Baca-Tulis Abad 21." Kompasiana.Com. 2021.
<https://www.kompasiana.com/idrisapandi/5c920da695760e26c9003b35/pentingnya-literasi-baca-tulis-abad-ke-21>.
- Hakim, Maksud. 2015. *Sufisme dan Transformasi Nelayan*. Edited by Harifuddin Halim. Jakarta: Orbit Press.
- Halim, Harifuddin. 2018. "Syncretization between Immanent and Transcendental Belief in Fishermen Community." *The Anthropologist*.
<https://doi.org/10.31901/24566802.2018/33.1-3.1944>.
- Iskandar, Abdul Malik, and Harifuddin Halim. 2019. "Mekanisme Pemberdayaan

- Gelandangan dan Pengemis di Kota Makassar (Studi Kasus Di Perumahan BTP Tamalanrea)." Makassar. <https://doi.org/10.26618/kjap.v5i2.2236>.
- Kurniawan, Andre. 2021. "Feodalisme Adalah Sistem yang Memberi Kekuasaan Pada Bangsawan." Merdeka.Com. 2021. <https://www.merdeka.com/jabar/feodalisme-adalah-sistem-yang-memberi-kekuasaan-pada-bangsawan-berikut-penjelasan-nya-kln.html>.
- Mulyani, Iwed. 2020. "Potensi dan Tantangan Pemberdayaan Masyarakat Lahan Gambut: Studi Pendekatan Kehidupan Berkelanjutan di Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai." *Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 11 (1): 1–20. <https://doi.org/10.20414/komunitas>.
- Reskiaddin, La Ode, Vina Yulia Anhar2, Sholikhah Sholikhah, and Wartono Wartono. 2020. "Tantangan dan Hambatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Penyakit Tidak Menular di Daerah Semi-Perkotaan : Sebuah Evidence Based Practice Di Padukuhan Samirono, Sleman Yogyakarta." *Jurnal Kesmas Jambi* 4 (2): 43–49. <https://doi.org/10.22437/jkmj.v4i2.10569>.
- Sonbait, Lukas Y., and Yustina L.D. Wambrau. 2011. "Permasalahan dan Solusi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Biogas Sebagai Energi Alternatif di Manokwari Papua Barat." *Jurnal Ilmu Ternak* 11 (2): 87–91.
- Sukhemi, Sukhemi, and Siti Maisaroh. 2019. "Pembentukan Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Budaya Kewirausahaan untuk Mengurangi Pengangguran dan Kemiskinan." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 8 (1): 31–38. <https://doi.org/10.32639/jiak.v8i1.284>.

Penulisan *Book Chapter* ini merupakan curahan gagasan brilian dari akademisi, pemerhati dan praktisi sosial, ekonomi, dan hukum. Juga sebagai bentuk kolaborasi ilmiah dalam memasyarakatkan gagasan cemerlang tersebut. Buah pikiran yang ada ini pun merupakan bentuk keprihatinan Tim Penulis atas realitas sosial sehari-hari yang masih jauh dari harapan ideal, sehingga diperlukan sebuah karya akademik dalam mencari solusi dengan mengungkap problematika sosial-budaya-ekonomi-hukum tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, *Book Chapter* ini pun mengeksplorasi berbagai sudut pandang (perspektif) atas problematika yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Diantaranya persoalan sosial budaya dalam pemberdayaan masyarakat, penanganan lingkungan, penyelesaian konflik agama, pendampingan masyarakat urban dan pesisir, masalah pendidikan, pengentasan kemiskinan, relasi negara dan masyarakat, media digital, masyarakat konsumen, penanganan bencana, perbaikan kesehatan masyarakat, pertanian, penanganan narkoba, dan kepariwisataan merupakan tema utama yang dikaji secara mendalam. Hasil kajian tersebut memberikan perspektif baru bagi pembaca sekaligus menjadi informasi dan rujukan bagi penentu kebijakan dalam merumuskan penanganan atas berbagai kasus yang ditemukan.



Jl. Nyi Wiji Adisoro Rt. 03/01 Pelemsari
Prenggan Kotagede, Yogyakarta. 55172
Email Marketing Cs.: nutamedijogja@gmail.com
IKAPI No. 135/DIY/2021



ISBN: 978-623-5967-02-8



9 786235 967028